

**PENGARUH KEBIJAKAN ABENOMICS TERHADAP
INWARD FDI DI JEPANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional

OLEH:

MOCHAMMAD CHAERUL ARDAN

E061201059

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENGARUH KEBIJAKAN ABENOMICS TERHADAP INWARD
FDI DI JEPANG

N A M A : MOCHAMMAD CHAERUL ARDAN

N I M : E061201059

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 3 Juni 2024



Pembimbing I,

Pembimbing II,

M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.
NIP. 196307041988031001

Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA
NIDN. 0906108902

Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,

Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PENGARUH KEBIJAKAN ABENOMICS TERHADAP INWARD FDI DI JEPANG

N A M A : MOCHAMMAD CHAERUL ARDAN

N I M : E061201059

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 27 Mei 2024.



Ketua : M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

This block contains three handwritten signatures in black ink, each corresponding to one of the members of the evaluation team listed on the left. The signatures are written over horizontal dotted lines. The first signature is for M. Imran Hanafi, the second for Atika Puspita Marzaman, and the third for Ishaq Rahman.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Chaerul Ardan

Nomor Induk Mahasiswa : E061201059

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Kebijakan *Abenomics* terhadap *Inward* FDI di Jepang”

Adalah benar merupakan karya ilmiah saya sendiri dan tidak diambil dari karya tulisan orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat, jika pada kemudian hari ditemukan bukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, kecuali kutipan yang telah saya cantumkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Juni 2024



Mochammad Chaerul Ardan

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada-Nya atas limpahan rahmat, petunjuk, kekuatan, ilmu, dan nikmat-Nya karena berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Pengaruh Kebijakan Abenomics terhadap Inward FDI di Jepang" sebagai bentuk dedikasi dalam penyelesaian studi sarjana dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Tidak lupa Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut setia hingga akhir zaman.

Penelitian ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua, Abi **Zubair Saing**, Bunda **Maryam**, Ibu **Surahmi** dan Bapak **Jufri Jawa** yang telah senantiasa memberikan dukungan, do'a, dan perhatian yang tidak terbatas kepada Penulis. Terima kasih telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengemban ilmu setinggi mungkin pada bidang yang Penulis pilih. Segala bentuk perhatian, dukungan, dan pengorbanan orang tua untuk membesarkan dan menuntun Penulis hingga mencapai titik ini tidak dapat terbalaskan oleh Penulis. Dengan berakhirnya masa studi S1 Penulis, semoga dapat membawa

Penulis kepada kehidupan yang dapat memberikan kebahagiaan dan kebanggaan untuk orang tua Penulis.

2. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **Prof. H.Darwis, MA., Ph.D** yang telah banyak berjasa menjadikan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin sebagai tempat yang berkualitas untuk menuntut ilmu. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para dosen pembimbing skripsi Penulis, Bapak **M. Imran Hanafi, MA., MEc.** dan Ibu **Atika Puspita Marzaman S. IP., MA.** yang telah membimbing dan membantu dengan sabar dan penuh dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa arahan dari kedua dosen pembimbing, Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa seluruh jajaran **Dosen beserta Staff Departemen Ilmu Hubungan Internasional** atas ilmu dan pengetahuan serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh Pendidikan S1.
3. Keluarga penulis, yaitu adik-adik **Lutfi Nabil Fikri** dan **Aini**, Om **Zafril, Zaenal, Safah**, dan **Arafah**, yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi yang tiada henti selama penulis menempuh Pendidikan Sarjana
4. Teman-teman penulis, **Ulla, Daffah** dan teman-teman lain yang tidak sempat Penulis tuliskan satu-persatu, teman-teman Departemen HI Angkatan 2020 **ALTERA** yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan moral dan berbagi informasi selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Teman-teman keluarga **UKM**

BASKET UNHAS, Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan baik dalam hal akademik maupun non akademik.

5. *Last but not least*, **Andini Faradilla** yang telah memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang, serta semangat yang luar biasa selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih tak terhingga karena telah menjadi pendengar keluh kesah dalam penulisan skripsi, penasehat yang baik dan senantiasa memberikan cinta.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa kerjasama dan dukungan dari semua pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional.

ABSTRAK

Mochammad Chaerul Ardan, (E061201059), “Pengaruh Kebijakan *Abenomics* terhadap *Inward* FDI di Jepang”, di bawah bimbingan M. Imran Hanafi, MA, M.Ec. selaku Pembimbing I dan Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA. selaku Pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kebijakan terkait *inward* FDI dan dampak kebijakan *Abenomics* dalam memengaruhi *inward* FDI di Jepang pada sektor non keuangan. Kebijakan *Abenomics* yang diperkenalkan pada tahun 2012 bertujuan untuk mengatasi masalah deflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing Jepang di pasar global. Strategi ketiga *Abenomics*, yakni strategi pertumbuhan ditujukan untuk mendorong investasi di sektor swasta dan membuka pasar Jepang yang tertutup melalui serangkaian reformasi struktural dan promosi investasi asing langsung (FDI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis interpretatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dari berbagai sumber sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasikan data ke berbagai kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit tertentu untuk disintesis, mengidentifikasi pola, menentukan signifikansi, dan mengekstraksi informasi untuk dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari strategi ekspansi global, reformasi Kawasan Khusus Strategis Nasional dan optimalisasi peran Japan External Trade Organization (JETRO) sebagai bagian dari strategi pertumbuhan *Abenomics* telah membawa dampak yang signifikan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi investasi asing di Jepang. Implementasi tersebut juga berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan asing, jumlah perusahaan asing, penurunan tarif pajak efektif, peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta peningkatan tenaga kerja asing profesional. Data menunjukkan bahwa jumlah *inward* FDI di Jepang meningkat secara signifikan sejak penerapan kebijakan ini pada tahun 2014, mencapai puncaknya pada tahun 2020. Dengan pencapaian ini, strategi pertumbuhan *Abenomics* telah berhasil membantu Jepang untuk menjadi tujuan investasi yang menarik bagi perusahaan asing, serta meningkatkan peran Jepang dalam perekonomian global.

Kata Kunci: Kebijakan *Abenomics*, Strategi Pertumbuhan, *Inward* FDI

ABSTRACT

Mochammad Chaerul Ardan, (E061201059), “The Impact of Abenomics Policy on Inward FDI in Japan”, under the guidance of M. Imran Hanafi, MA, M.Ec. as Supervisor I and Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA. as Supervisor II in Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to analyze the form of policies related to inward FDI and the impact of Abenomics policy on inward FDI in Japan, particularly in the non-financial sector. Introduced in 2012, the Abenomics policy seeks to address deflation issues, stimulate economic growth, and enhance Japan’s competitiveness in the global market. The third arrow of Abenomics, known as the growth strategy, focuses on fostering private sector investment and opening up previously restricted Japanese market through structural reforms and the promotion of FDI. This study uses a qualitative approach with interpretative analysis and draws data from literature studies obtained from various secondary sources. Data analysis in this study involves categorizing and synthesizing information, identifying patterns, assessing significance, and deriving conclusions.

The findings in this study shows that the implementation of the global expansion strategy, alongside with the reform of the Special National Strategic Zone and the optimization of Japan External Trade Organization’s (JETRO) role within the Abenomics growth strategy has significantly improved the business environment for foreign investment in Japan. This implementation has also led to an increase in foreign tourist, foreign companies, a decrease in effective tax rates, increase in the implementation of good corporate governance, and increase in professional foreign workers. The data shows that the amount of inward FDI in Japan has increased significantly since the implementation of this policy in 2014, reaching a peak in 2020. Through these achievements, the Abenomics growth strategy has effectively succeeded positioned Japan as an attractive investment destination for foreign enterprises while bolstering Japan’s role in the global economy.

Keywords: Abenomics Policy, Growth Strategy, Inward FDI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Batasan dan Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.4. Kerangka Konseptual.....	13
1.4.1. Neoliberalisme	14
1.4.2. Investasi Asing Langsung (FDI)	15
1.5. Metode Penelitian	18
1.5.1. Jenis Penelitian.....	18
1.5.2. Jenis Data	18
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data	19
1.5.4. Teknik Analisis Data.....	19
1.5.5. Tahapan Penelitian	20
1.6. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1. Landasan Teori	22
2.1.1. Neoliberalisme	22
2.1.2. Investasi Asing Langsung (FDI)	25
2.2. Penelitian Terdahulu	27
BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN ABENOMICS	29
3.1. Kebijakan Moneter Agresif	30

3.2. Kebijakan Fiskal Fleksibel	32
3.3. Strategi Pertumbuhan.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Strategi Peningkatan <i>Inward</i> FDI Jepang	45
4.2. Dampak Kebijakan <i>Abenomics</i> terhadap <i>Inward</i> FDI di Jepang.....	55
4.2.1. Reformasi Kawasan Khusus Strategis Nasional	61
4.2.2. Memperkuat Kapabilitas Pemerintah dalam Menarik Perusahaan Asing	70
BAB V PENUTUP	83
5.1. Simpulan	83
5.2. Saran dan Keterbatasan Penelitian.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Faktor-faktor yang Menghambat Investasi Perusahaan Asing di Jepang	57
Tabel 4.2 Proyek Kawasan Khusus Strategis Nasional	61
Tabel 4.3 Perusahaan Asing di Kawasan Tokyo.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB Tahunan Jepang Periode 1980-2012	2
Gambar 1.2 Arus Masuk Bersih FDI di Jepang	9
Gambar 1.3 Kerangka Konseptual	17
Gambar 4.1 Peningkatan Turis Asing yang Berkunjung ke Prefektur Okinawa ..	69
Gambar 4.2 Proyek Investasi yang Didukung oleh JETRO Berdasarkan Negara Asal (2003-2016)	72
Gambar 4.3 Sektor Investasi Dominan yang Didukung oleh JETRO Berdasarkan Jenis Industri (2003-2016)	73
Gambar 4.4 Sepuluh Prefektur dengan Jumlah Perusahaan Asing Terbanyak	75
Gambar 4.5 Penurunan Tarif Pajak Efektif Perusahaan di Jepang (2013-2016) ..	76
Gambar 4.6 Rasio Perusahaan yang Menunjuk Direktur Independen Eksternal ..	77
Gambar 4.7 Jumlah Tenaga Kerja Asing Profesional di Jepang (2013-2017).....	78
Gambar 4.8 <i>Inward</i> FDI Jepang (2008-2022).....	79
Gambar 4.9 <i>Inward</i> FDI Berdasarkan Sektor Industri	81

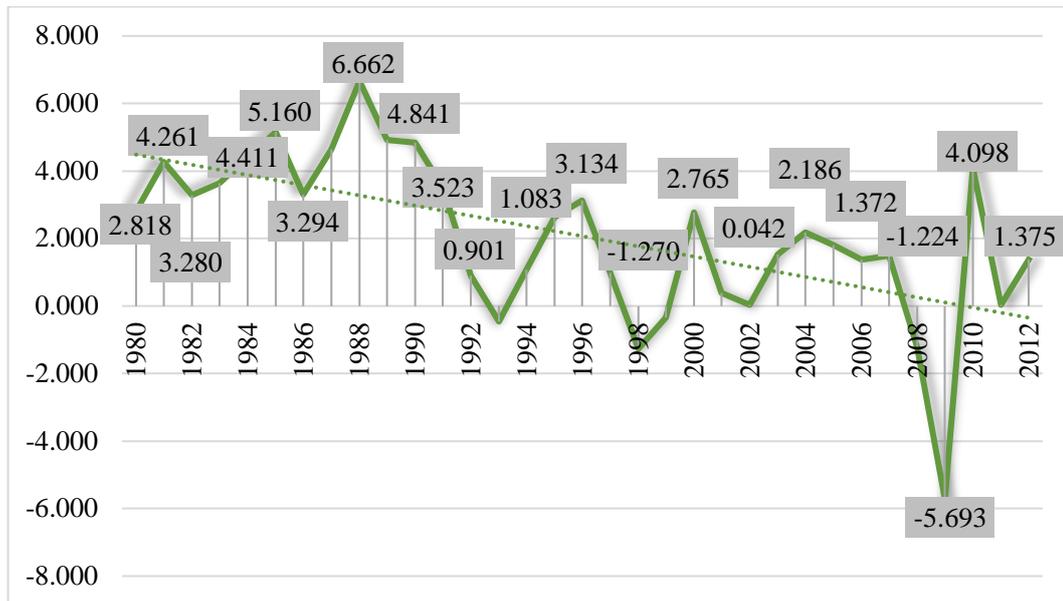
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fase pertumbuhan yang cepat di Jepang pada akhir 1980-an menyebabkan terbentuknya gelembung besar di pasar *real estate* dan saham dan membuat harga aset meroket dengan tajam (Zestos dkk., 2022). Menurut De (2020), fenomena gelembung tersebut disebabkan oleh masalah-masalah di bidang kebijakan moneter dan kredit keuangan. Gelembung ekonomi tersebut akhirnya pecah pada tahun 1990-an dan menyebabkan Jepang mengalami krisis keuangan yang ditandai dengan kenaikan harga tanah lebih dari empat kali lipat (Polivalov, 2023). Efek dari pecahnya gelembung tersebut dan krisis yang terjadi setelahnya, secara jangka panjang berkontribusi pada penciptaan deflasi dan perlambatan ekonomi yang menerpa Jepang (Shirakawa, 2021).

Selain terjadinya perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi secara umum, Jepang juga mengalami penurunan yang signifikan dalam investasi domestik serta penurunan tingkat inflasi yang terjadi secara berkepanjangan (Mourdoukoutas, 2023). Penurunan tingkat inflasi yang terjadi secara berkepanjangan ini semakin diperparah oleh deflasi yang sedang terjadi dan juga berkaitan erat dengan perlambatan dalam investasi domestik (Carr, 2021). Fenomena perlambatan ekonomi yang dialami oleh Jepang dalam kurun waktu antara tahun 1980 hingga tahun 2012 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB Tahunan Jepang Periode 1980-2012
(dalam persen)**

Sumber: World Bank (2024).

Grafik yang disajikan di atas menunjukkan fakta dimana sejak tahun 1980 hingga 2012, Jepang terus mengalami tren perlambatan dalam pertumbuhan ekonominya yang diukur dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1980-an, Jepang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat jika dilihat dari PDB-nya. Pertumbuhan ekonomi ini mencapai puncaknya pada tahun 1988 dengan peningkatan sebesar 6,662%. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, khususnya pada tahun 1992 hingga 1993, Jepang mengalami penurunan yang tajam dalam pertumbuhan ekonominya hingga menyentuh angka negatif. Fenomena menurunnya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor pecahnya gelembung aset yang terjadi pada tahun 1990-an di Jepang. Selanjutnya Jepang kembali mengalami pertumbuhan ekonomi

yang negatif dan sangat signifikan pada tahun 2009 dimana terjadi penurunan PDB yang sangat tinggi hingga mencapai -5,693%.

Data tersebut menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Jepang sebagai akibat dari terjadinya deflasi secara berkepanjangan. Di samping itu, data tersebut juga secara jelas memperlihatkan terjadinya tren pertumbuhan ekonomi yang terus menurun di Jepang. Meskipun demikian, *The Economist* (2023) menyatakan bahwa meskipun Jepang terus mengalami perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi, masih terdapat indikasi potensi pembaruan yang dapat menjadi titik balik bagi perekonomian Jepang. Potensi tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk prospek untuk mengatur ulang ekspektasi inflasi, meningkatkan produktivitas, hingga mendukung dinamisme korporasi yang selanjutnya dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

Perlambatan dalam pertumbuhan ini berdampak pada posisi Jepang dalam persaingan ekonomi internasional. Sementara Jepang masih berjuang menghadapi deflasi berkepanjangan, negara-negara Asia Timur dan Tenggara lainnya seperti China, Hong Kong, dan Singapura berkembang sebagai pusat logistik dan perdagangan di tingkat global. Hal ini dapat menyebabkan Jepang kehilangan daya saing dan tertinggal dalam perlombaan pengembangan teknologi baru yang pada akhirnya dapat membuat Jepang kehilangan daya saingnya dalam perekonomian internasional (Parc, 2018).

Dalam rangka mengejar pembaruan tersebut, pada tahun 2012 Pemerintahan Shinzo Abe memperkenalkan paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai *Abenomics*. Paket kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah deflasi berkepanjangan yang melanda Jepang, mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, hingga meningkatkan daya saing Jepang di kancah global (Takao, 2021). Namun, efektivitas dari implementasi paket kebijakan tersebut masih belum mencapai titik optimalnya. Meskipun kebijakan tersebut berhasil mengeluarkan Jepang dari ‘jurang’ deflasi, namun kebijakan tersebut masih belum mampu mencapai target inflasi yang ditetapkan sebesar 2 persen (Ito, 2021).

Selain itu, Lincoln (2020) menambahkan bahwa pendekatan tiga cabang yang diadopsi dalam paket kebijakan *Abenomics* yang terdiri dari kebijakan moneter yang agresif, kebijakan fiskal yang fleksibel, dan pertumbuhan ekonomi sebenarnya telah tersusun dengan baik, namun implementasinya masih belum mampu mencapai potensi maksimalnya akibat kurangnya koordinasi dan upaya Jepang yang masih kurang agresif dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan pertama dari paket kebijakan *Abenomics* adalah kebijakan moneter yang agresif. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan persoalan deflasi berkepanjangan yang telah berlangsung selama lebih dari 15 tahun di Jepang (Ito, 2021). Lebih lanjut Ito (2021) menambahkan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan ini, Perdana Menteri Abe memberikan tekanan yang kuat pada Bank Jepang untuk menyetujui kerangka dan dokumen penargetan inflasi dengan target 2 persen. Kebijakan tersebut akhirnya ditandatangani oleh

Bank Jepang dan Pemerintah Jepang pada tanggal 22 Januari 2013 sekaligus menjadi titik awal dari implementasi kebijakan tersebut.

Walaupun dalam implementasinya kebijakan tersebut tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, Perdana Menteri Abe dan pendukung kebijakan *Abenomics* lainnya menganggap bahwa kebijakan moneter tersebut sudah cukup mampu untuk mengeluarkan Jepang dari perangkap deflasi yang berkepanjangan sekaligus meningkatkan kinerja makroekonomi melalui pendekatan yang lebih fleksibel dalam mengelola inflasi (Ito, 2021). Selain itu, kebijakan tersebut juga membawa dampak positif bagi Jepang dalam hal peningkatan lapangan pekerjaan, produktivitas, serta investasi modal (Hayashi, 2020).

Kebijakan kedua dari paket kebijakan *Abenomics* adalah kebijakan fiskal yang bersifat fleksibel. Kebijakan ini disebut fleksibel karena secara potensial, kebijakan ini memungkinkan terlaksananya kebijakan fiskal *counter-cyclical* yang lebih fleksibel (Ito, 2021). Kebijakan fiskal *counter-cyclical* tersebut bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah selama masa resesi dan menguranginya di masa pertumbuhan. Bersamaan dengan penargetan inflasi dan *Quantitative Qualitative Estimation* (QQE), kebijakan ini diimplementasikan melalui penganggaran pemerintah dan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, peningkatan laju inflasi, dan menurunnya tingkat pengangguran pada tahun 2013. Selanjutnya kebijakan ini juga memberlakukan kenaikan tarif pajak yang dilaksanakan pada Oktober 2019 untuk kedua kalinya dan sebagian dari pendapatan pajak tersebut

dialihkan dari skema pengurangan defisit menjadi anggaran untuk menyediakan pendidikan tinggi dan taman kanak-kanak gratis bagi keluarga yang berpenghasilan rendah di Jepang.

Kebijakan ketiga dari paket kebijakan *Abenomics* adalah strategi pertumbuhan yang mencoba untuk mendorong investasi di sektor-sektor privat. Tujuan utama dari strategi pertumbuhan ini adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi dan bisnis dimana investasi dilakukan secara aktif, lingkungan dimana masyarakat dapat mewujudkan potensinya secara maksimal, terciptanya berbagai pasar baru, serta terintegrasinya perusahaan dan masyarakat. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang untuk mencapai tujuan tersebut terutama adalah melalui implementasi reformasi struktural dan pembukaan pasar tertutup. Perusahaan dan sektor-sektor lainnya yang tercakup dalam strategi ini secara luas berkisar dari pengembangan sumber daya manusia melalui usaha kecil dan menengah (UKM), pengembangan di sektor teknologi informasi, promosi ilmu pengetahuan, reformasi di bidang pertanian dan pasar tenaga kerja, hingga penanaman modal asing langsung (*inward FDI*) (Grabowiecki, 2019).

Kebijakan *Abenomics* memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan bagi Jepang. Implementasi kebijakan *Abenomics* berdampak pada berbagai kebijakan perdagangan dan investasi Jepang dalam sistem perdagangan internasional. Hal tersebut dapat terlihat pada upaya diplomasi perdagangan strategis yang memanfaatkan perdagangan bilateral dan multilateral untuk mendorong *inward FDI* di Jepang. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh

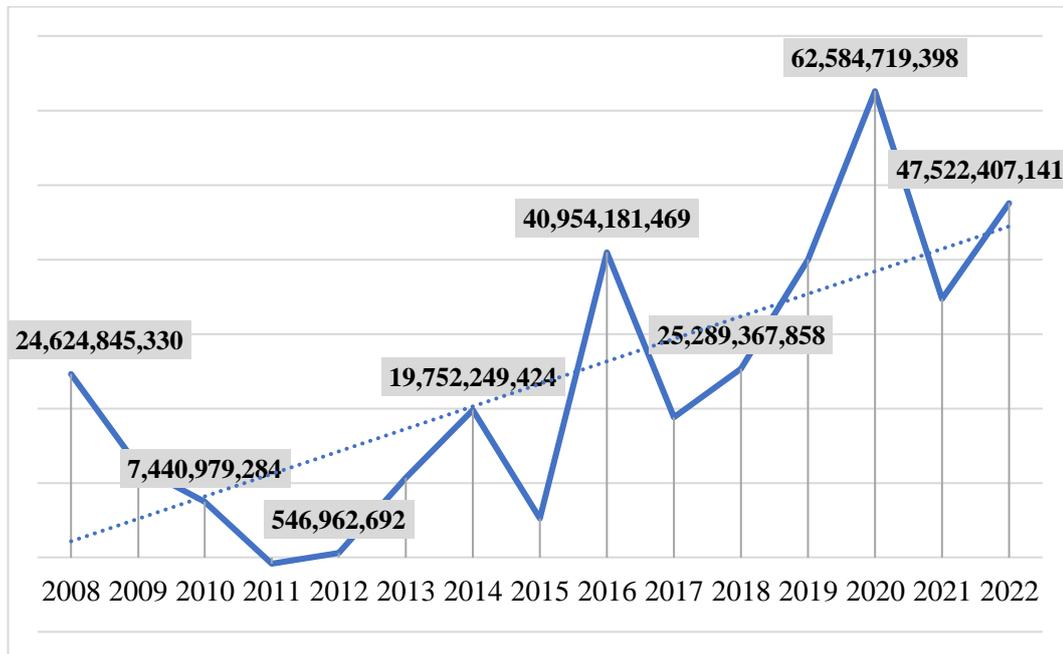
pemerintah Jepang melalui peningkatan kemitraan ekonomi dengan berbagai negara-negara Asia dan Eropa (Zhang, 2023).

Salah satu indikator penting untuk menilai efektivitas paket kebijakan *Abenomics* adalah dampaknya terhadap aliran investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) ke Jepang. Namun, perlu untuk dicatat bahwa meskipun terjadi peningkatan dalam stok FDI, peningkatan tersebut masih belum mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga faktor tersebut masih menimbulkan keraguan publik terhadap efektivitas dari kebijakan tersebut (Hoshi & Kiyota, 2019). Selain itu pada awal penerapannya, paket kebijakan *Abenomics* direspons secara positif oleh para investor asing, namun ekspektasi tersebut tidak bertahan lama karena dampak kebijakan tersebut terhadap FDI tidak cukup konsisten dalam jangka waktu yang panjang (Kondo dkk., 2020).

Inward FDI merupakan komponen kunci yang menjadi fokus strategis dalam panah ketiga kebijakan *Abenomics*. Kebijakan untuk mempromosikan *inward* FDI merupakan langkah krusial untuk menghadapi tantangan persaingan secara global yang semakin ketat (Dourille-Feer, 2015). *Inward* FDI berperan sebagai sumber pembiayaan bagi investasi dalam negeri yang dapat mendorong produktivitas dan memperkuat daya saing Jepang dalam skala global, khususnya sebagai aktor penting yang menyediakan *input* berteknologi tinggi dalam rantai perekonomian global (Botman & Kang, 2015). Melalui strategi tersebut, Jepang diharapkan dapat tetap mempertahankan integrasi ekonominya dengan perekonomian global serta memperkuat kemitraan ekonominya dengan negara-negara lain. Salah satu bentuk kemitraan ekonomi yang dibangun adalah perjanjian

Kemitraan Trans Pasifik (*Trans Pacific Partnership*) yang menetapkan aturan perdagangan dan investasi antara 12 negara Asia Pasifik. Selain itu, Jepang juga berkontribusi dalam perumusan peraturan global yang mengatur terkait perdagangan dan investasi melalui *Japan-EU Economic Partnership Agreement* (EPA), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), dan Japan-China-ROK FTA (Ministry of Foreign Affairs, 2017).

Kondisi investasi asing langsung (FDI) di Jepang mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Fluktuasi tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2008, jumlah arus masuk bersih FDI di Jepang berada pada angka 24.622 juta USD. Selanjutnya, sejak kebijakan *Abenomics* diluncurkan pada tahun 2012, arus masuk bersih FDI di Jepang menunjukkan perbaikan dengan jumlah FDI yang kembali menjadi positif setelah sempat menyentuh angka negatif pada tahun 2011. Meskipun sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2015, namun lambat laun arus FDI Jepang semakin membaik hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan jumlah arus masuk bersih FDI sebesar 64.528 juta USD. Meskipun sempat kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 dimana jumlah FDI turun menjadi 34.669 juta USD, namun jumlah FDI Jepang kembali meningkat ke angka 47.522 juta USD. Data tersebut menunjukkan minat yang tinggi dari investor asing dalam mengalokasikan modalnya ke Jepang pasca pemberlakuan kebijakan *Abenomics*. Secara lebih lanjut, data terkait arus masuk bersih FDI di Jepang dapat dilihat pada grafik berikut ini.



**Gambar 1.2 Arus Masuk Bersih FDI di Jepang
(dalam USD)**

Sumber: World Bank (2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak konkret dari kebijakan ekonomi *Abenomics* terhadap peningkatan investasi asing langsung (FDI) di Jepang. Fokus analisis penelitian ini terpusat pada evaluasi langsung terhadap cara kebijakan *Abenomics*, khususnya panah ketiga: strategi pertumbuhan mempengaruhi *inward* FDI di Jepang. Dengan pendekatan yang terfokus pada hasil praktis dari kebijakan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kebijakan *Abenomics* terhadap arus *inward* FDI.

Panah ketiga kebijakan *Abenomics*, yakni strategi pertumbuhan merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh Jepang untuk mengintegrasikan perekonomiannya secara global melalui upaya untuk menarik orang, barang, dan

modal dari luar negeri. Strategi ini merupakan bentuk diplomasi ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Jepang melalui penerapan langkah-langkah pembuatan peraturan untuk memperkuat perekonomian Jepang yang terbuka dan bebas, memberikan dukungan untuk ekspansi perusahaan Jepang ke luar negeri melalui kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, serta diplomasi sumber daya dan mendorong *inward* FDI ke Jepang (Ministry of Foreign Affairs, 2017).

Berdasarkan data yang dilansir Japan External Trade Organization (JETRO), total nilai FDI masuk ke Jepang per tahun 2022 didominasi oleh industri mesin dan peralatan listrik pada sektor manufaktur dengan nilai FDI sebesar 1.257 juta USD, di antara MNC besar di sektor ini misalnya Japan Hp Co., Ltd., Bosch Corporation, Japan Texas Instruments LLC, dan sebagainya. Sedangkan sektor non manufaktur didominasi oleh industri keuangan dan asuransi dengan nilai FDI sebesar 8.946 juta USD per tahun 2022, di antara MNC besar di sektor ini misalnya AXA Holdings Japan Co., Ltd., Allianz Fire and Marine Insurance Co., Ltd., Citigroup Japan Holdings LLC, dan sebagainya.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis berupaya menggali lebih dalam mengenai pengaruh kebijakan *Abenomics* terhadap *inward* FDI dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kebijakan *Abenomics* terhadap *Inward* FDI di Jepang”.

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah

Periode deflasi berkepanjangan yang dialami oleh Jepang telah mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif bagi perekonomian Jepang. Kelanjutan tren deflasi tersebut menyebabkan terjadinya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, penurunan daya beli konsumen, serta penurunan pada investasi domestik. Akibatnya, kondisi ini telah menciptakan lingkungan yang kurang menguntungkan bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Jepang. Lahirnya kebijakan *Abenomics* yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada masa kepemimpinannya merupakan upaya untuk mengatasi masalah deflasi berkepanjangan yang melanda negara tersebut, termasuk untuk meningkatkan *inward* FDI di Jepang.

Analisis dalam penelitian ini akan berfokus pada kebijakan terkait *inward* FDI dalam kerangka kebijakan *Abenomics* serta dampak dari kebijakan *Abenomics* dalam mempengaruhi *inward* FDI pada sektor non keuangan di Jepang. Sektor non keuangan terdiri dari sub sektor manufaktur dan non-manufaktur. Sub sektor manufaktur terdiri dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang makanan, tekstil, kayu dan *pulp*, bahan kimia dan obat-obatan, minyak bumi, karet dan kulit, kaca dan keramik, besi dan logam lainnya, mesin umum, mesin listrik, peralatan transportasi, dan mesin presisi. Sedangkan sub sektor non-manufaktur terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan kehutanan, perikanan dan kelautan, pertambangan, konstruksi, transportasi, komunikasi, grosir dan eceran, *real estate*, dan jasa. Berdasarkan batasan penelitian tersebut, penulis mengajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk kebijakan terkait *inward* FDI dalam kerangka kebijakan *Abenomics*?
2. Bagaimana dampak kebijakan *Abenomics* dalam memengaruhi *inward* FDI di Jepang pada sektor non keuangan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Menganalisis bentuk kebijakan terkait *inward* FDI dalam kerangka kebijakan *Abenomics* di Jepang.
2. Menganalisis dampak kebijakan *Abenomics* dalam memengaruhi *inward* FDI di Jepang pada sektor non keuangan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini meliputi kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai korelasi antara kebijakan *Abenomics* yang diimplementasikan oleh pemerintah Jepang dan dampaknya pada *inward* FDI di Jepang. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman teoritis tentang bagaimana kebijakan reformasi struktural dalam kebijakan *Abenomics* berperan dalam menarik investasi asing langsung dalam konteks ekonomi global saat ini.

Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat menghasilkan kerangka kerja konseptual yang dapat diterapkan pada situasi serupa di negara lain yang mengalami tantangan serupa dengan yang dialami oleh Jepang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, analisis terhadap dampak konkret dari kebijakan *Abenomics* terhadap *inward* FDI di Jepang dapat menjadi panduan dan referensi dalam merancang kebijakan secara efektif untuk menarik investasi asing langsung, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki stabilitas finansial di suatu negara. Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki implikasi langsung dalam konteks praktis bagi pengambil kebijakan ekonomi baik di Jepang maupun di skala internasional.

1.4. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menganalisis bentuk kebijakan terkait *inward* FDI dalam kebijakan *Abenomics* dan dampak dari kebijakan *Abenomics* terhadap *inward* FDI di Jepang.

Penelitian ini akan berfokus pada panah ketiga kebijakan *Abenomics*, yakni “strategi pertumbuhan” dengan tujuan untuk memahami bagaimana implementasi dari kebijakan ini berperan dalam peningkatan *inward* FDI di Jepang. Panah ketiga kebijakan *Abenomics* dalam implementasinya menerapkan solusi dari kebijakan neoliberal yang memuat strategi untuk melakukan reformasi secara struktural terhadap perekonomian yang melibatkan deregulasi, reformasi tata kelola

perusahaan, reformasi kebijakan ketenagakerjaan, perubahan undang-undang perusahaan, kebijakan tenaga kerja asing, dan sebagainya (Lincoln, 2020). Selain itu, Biyik (2021) juga menambahkan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan persaingan, reformasi pada pasar tenaga kerja, dan perluasan kemitraan perdagangan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

1.4.1. Neoliberalisme

Neoliberalisme berkembang pada tahun 1970-an ketika paradigma realis sedang berjuang untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh transformasi isu-isu yang sebelumnya dianggap fundamental dan tidak berubah oleh para kaum realis. Transformasi tersebut mencakup proses globalisasi yang terjadi secara cepat, dan yang lebih penting ialah menyangkut intensifikasi integrasi di Eropa Barat (Kapitonenko, 2022). Neoliberalisme sebagai sebuah konsep yang dicirikan dengan sifatnya yang kompleks dan beragam dengan penekanan utama pada logika pasar, pengurangan hambatan bisnis, dan peningkatan disiplin negara kesejahteraan (*welfare state*) (Toft, 2021). Hal tersebut mencakup rasionalitas pemerintahan yang memprioritaskan pasar bebas dan tanggung jawab individu sehingga sering kali mengorbankan kesejahteraan sosial dalam prosesnya (Eggemeier & Fritz, 2020).

Neoliberalisme memiliki prinsip yang sangat menekankan pada pasar bebas sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah perekonomian. Aliran ini juga telah menjadi pendorong utama atas berbagai kebijakan neoliberal yang mengarah pada rekonfigurasi atau rekonstitusi kekuasaan negara dengan cara meminimalkan intervensi negara dalam perekonomian serta mengurangi tanggung jawab negara

untuk mengurus rakyatnya (Harvey, 2005). Selain itu, neoliberalisme yang menganut prinsip-prinsip yang bercirikan pada logika pasar dan pengurangan regulasi juga telah menjadi kekuatan yang dominan dalam pembentukan tata kelola dan masyarakat global (Toft, 2021).

Hubungan antara neoliberalisme dan kebijakan *Abenomics* di Jepang dapat dilacak melalui pernyataan Biyik (2021) yang menyatakan bahwa *Abenomics* merupakan kebijakan yang mencirikan prinsip neoliberal baru dan memiliki potensi untuk memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Jepang. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk membangun solusi yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah stagnasi ekonomi yang melanda Jepang. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini upaya untuk melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan melalui pemberian insentif untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip neoliberal yang menekankan pada persaingan pasar. Perpaduan dari pendekatan ini ditujukan untuk mengatasi tantangan ekonomi kompleks yang dihadapi oleh Jepang melalui pemberian stimulus dan mengakomodasi peran pasar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1.4.2. Investasi Asing Langsung (FDI)

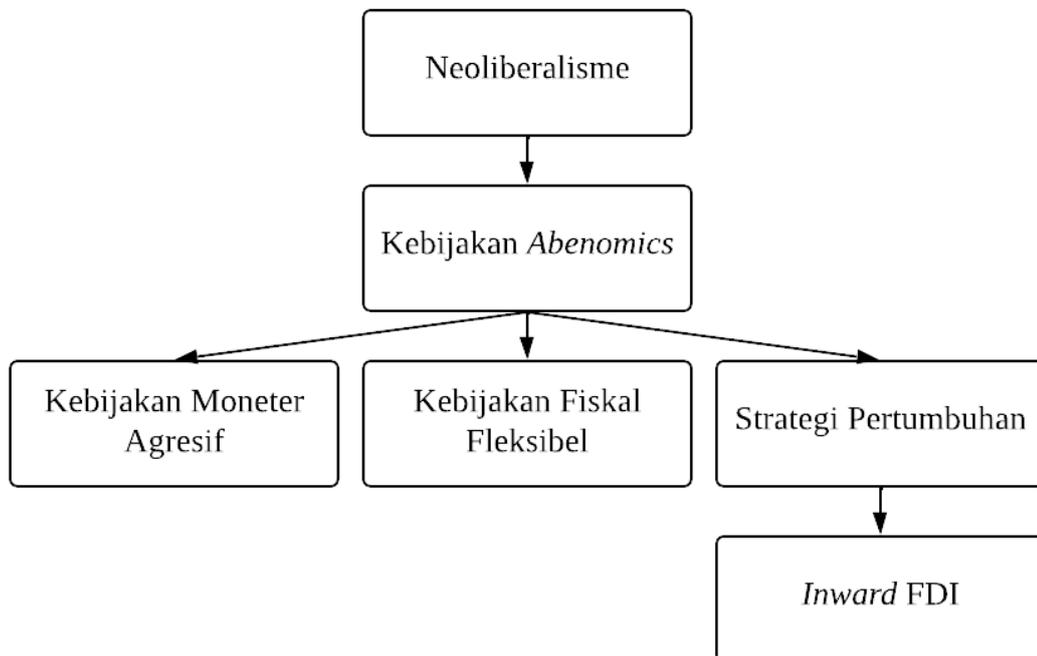
Investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan komponen penting dari globalisasi di bidang ekonomi yang melibatkan akuisisi aset asing oleh perusahaan multinasional (MNC) (Plouffe, 2020). Argumentasi ini didukung oleh Moosa (2003) yang juga menyatakan bahwa FDI merupakan aspek penting dalam ranah bisnis internasional karena memerlukan akuisisi aset di suatu

negara oleh penduduk dari negara lainnya dengan tujuan utama untuk mengendalikan perusahaan atau bisnis yang berlokasi di negara tersebut. Investasi ini dicirikan dengan sifat jangka panjangnya yang mencerminkan kepentingan dan kontrol jangka panjang terhadap perusahaan asing (Moosa, 2003).

FDI dapat terwujud melalui cara merger dan akuisisi atau pendirian cabang asing yang sering kali memerlukan partisipasi aktif dan keterlibatan investor dalam pengelolaan perusahaan yang diakuisisi atau didirikan (Santis, 2012). Moran (2016) juga menambahkan bahwa selain melibatkan mekanisme akuisisi terhadap perusahaan lokal, FDI juga dapat dilakukan dalam bentuk pendirian afiliasi yang dimiliki sepenuhnya atau pembentukan usaha patungan (*joint ventures*). Oleh karena itu, FDI juga telah menjadi unsur utama dalam pembentukan jaringan global produksi, perdagangan, keuangan, transfer teknologi, pengetahuan, praktik manajerial, tenaga kerja, serta berkontribusi dalam interdependensi ekonomi secara global (Lagendijk & Hendriks, 2009).

Definisi terkait FDI mengacu pada fenomena dimana perusahaan yang berasal dari suatu negara memutuskan untuk melakukan ekspansi bisnis ke negara lain melalui pendirian afiliasi baru yang dimiliki sepenuhnya, mengakuisisi perusahaan lokal, atau membentuk usaha patungan di negara tuan rumah (Moran, 2016). Secara konseptual, FDI menawarkan berbagai keuntungan, khususnya ketika negara tuan rumah telah memiliki sistem keuangan yang telah maju dimana salah satunya adalah dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi negara tuan rumah (Hermes & Lensink, 2003).

FDI terbagi menjadi dua jenis, yakni FDI masuk (*inward FDI*) dan FDI keluar (*outward FDI*). FDI masuk (*inward FDI*) adalah investasi asing langsung yang dilakukan oleh perusahaan asing ke dalam negeri, sedangkan FDI keluar (*outward FDI*) adalah investasi asing langsung yang dilakukan oleh perusahaan lokal di luar negeri (Al-Shawaf & Almsafir, 2016). Secara teoritis, FDI masuk berfungsi sebagai pengganti investasi dalam negeri ketika perusahaan asing mendanai perusahaan lokal, sedangkan FDI keluar berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan perusahaan lokal atau dalam negeri untuk menembus pasar baru di luar negeri, mengimpor barang dari luar negeri dengan biaya yang lebih rendah, serta mengakses teknologi dari luar negeri (Islam dkk., 2022).



Gambar 1.3 Kerangka Konseptual

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berakar pada metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bakry (2019) dilakukan dengan tujuan untuk memperluas pemahaman tentang berbagai fenomena, kegiatan, dan proses sosial yang terjadi. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mempelajari secara lebih mendalam terkait pengaruh dari kebijakan *Abenomics* terhadap *inward* FDI di Jepang.

Penelitian ini akan menggunakan analisis interpretatif yang merupakan bentuk penelitian kualitatif yang melakukan investigasi dan eksplorasi data secara lebih mendalam untuk mengungkap dan menafsirkan makna sambil berusaha untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana praktik-praktik tertentu dikonfigurasi untuk mencapai hasil yang dapat diamati oleh peneliti (Bakry, 2019).

1.5.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder, yakni sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui individu atau dokumen (Sugiyono, 2019). Selain itu, sumber sekunder juga dapat dikatakan sebagai sumber data yang menawarkan jenis interpretasi dan analisis terhadap peristiwa, keadaan, ataupun pengalaman (Munck dkk., 2020).

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini mencakup teknik kepustakaan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber kepustakaan, baik dari sumber kepustakaan yang bersifat fisik maupun *online*. Dalam konteks ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik kepustakaan dengan melakukan pencarian untuk memperoleh data/informasi dari berbagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan. Sumber-sumber data/informasi ini akan dipilih dengan cermat agar dapat berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk melakukan penelitian.

Suharsimi (2006) mengungkapkan bahwa studi kepustakaan berfungsi sebagai metode pengumpulan data dimana serangkaian pemeriksaan secara sistematis dan analisis terhadap sumber data dilakukan selama prosesnya. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan berbagai literatur atau pustaka yang ada seperti buku, majalah, surat kabar, maupun berbagai literatur lainnya untuk dapat menemukan serta menetapkan prinsip dan teori yang mendasari penelitian ini.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Analisis data mengacu pada proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses tersebut melibatkan pengorganisasian data ke dalam berbagai kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit tertentu untuk dilakukan sintesis terhadapnya, mengidentifikasi pola, menentukan signifikansi, serta mengekstraksi informasi untuk dilakukan penarikan kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh penulis dan orang lain (Yakin, 2023).

Data yang telah diperoleh oleh penulis dalam bentuk data dokumentasi akan dijabarkan secara tekstual melalui proses analisis terhadap isi dokumen dengan cermat. Melalui pendekatan secara kualitatif ini, penulis akan melakukan analisis data secara komprehensif melalui penetapan, penguraian, dan pendokumentasian hubungan sebab-akibat serta faktor kontekstual dan rincian lainnya untuk memberikan penilaian terhadap gagasan atau makna yang terkandung dalam data/informasi yang digunakan.

Teknik yang digunakan dalam analisis data berfungsi sebagai sarana untuk mengategorikan data untuk mengidentifikasi pola hubungan dan tema, serta untuk menafsirkan dan memproses data, yang selanjutnya akan diartikulasikan dalam bentuk laporan penelitian secara tertulis.

1.5.5. Tahapan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan yang dimulai dari identifikasi terhadap topik penelitian, mengajukan pertanyaan penelitian dan pendekatan penelitian yang akan digunakan, dan melakukan pengumpulan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan tersebut akan menjadi sasaran analisis yang kemudian akan ditarik kesimpulannya.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dapat diuraikan dalam sistematika penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas penjelasan terkait penelitian yang terdiri dari pembahasan fenomena atau masalah yang menjadi latar belakang penelitian, batasan dan rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas terkait teori-teori yang melandasi penelitian ini yang terdiri dari teori tentang neoliberalisme, kebijakan *Abenomics*, investasi asing langsung (FDI), serta penelitian terdahulu.

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN ABENOMICS

Bab ini akan membahas terkait gambaran umum kebijakan *Abenomics* pada masa pemerintahan Shinzo Abe di Jepang, mulai dari kebijakan moneter yang agresif, kebijakan fiskal yang fleksibel, hingga strategi yang berorientasi pertumbuhan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas terkait temuan dan analisis data yang dilakukan terkait pengaruh antara kebijakan *Abenomics*, khususnya panah kebijakan ketiga, “strategi pertumbuhan”, terhadap peningkatan *inward* FDI di Jepang.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan membahas terkait kesimpulan hasil penelitian, serta saran dan kritik yang penulis berikan terhadap topik yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Neoliberalisme

Asal usul neoliberalisme dapat ditelusuri kembali pada era sebelum Perang Dunia Kedua, yakni sekitar tahun 1934, ketika Ludwig von Mises dan Friedrich Hayek terlibat dalam riset mengenai perekonomian global dan kemudian menyebarkan nilai dan konsep yang mereka anut (Slobodian, 2018). Istilah “neoliberalisme” mendapatkan popularitasnya pada akhir tahun 1970-an sebagai bentuk rasionalisasi terhadap praktik tata kelola pemerintahan yang menekankan pada prinsip pasar bebas, pengurangan regulasi bisnis, dan pembatasan perlindungan negara kesejahteraan (*welfare state*) (Peters, 2023). Selanjutnya neoliberalisme akhirnya menjadi ideologi yang dominan di Barat pada tahun 1980-an ketika Ronald Reagan dan Margareth Thatcher terpilih naik ke kursi kepemimpinan di Amerika Serikat dan Inggris. Momen tersebut menyebabkan pengaruh neoliberalisme meluas tidak hanya ke negara-bangsa (*nation-state*), tetapi juga ke berbagai organisasi internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia (Chodor, 2015).

Neoliberalisme merupakan aliran pemikiran yang mengakui pentingnya peran aktor selain negara dan menganggap negara sebagai aktor tunggal yang bertindak demi kepentingannya sendiri (Kaufman, 2022). Lahirnya neoliberalisme merupakan bentuk respons terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi

oleh aliran ekonomi klasik dan neoklasik sambil tetap berusaha untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar dari aliran liberalisme klasik (Henry, 2010). Upaya untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar tersebut terbukti dalam asumsi neoliberalisme yang tetap menganjurkan konsep-konsep seperti liberalisasi dan privatisasi (Ignjatović & Filipović, 2022).

Selain itu, sebagai bentuk pengembangan dari aliran neoklasik, neoliberalisme juga mempertahankan prinsip yang menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam perekonomian. Namun dalam kerangka pemikiran neoliberalisme, peran negara terbatas semata-mata hanya untuk memastikan berfungsinya pasar dengan baik melalui deregulasi dan privatisasi, subsidi untuk pengendalian inflasi, liberalisasi arus modal (*capital flows*) untuk menarik investasi asing, dan sebagainya (Albo & Fanelli, 2015). Hal ini mencerminkan esensi dari neoliberalisme yang memberikan penekanan terhadap logika pasar dan meminimalkan intervensi negara (Toft, 2021).

Neoliberalisme menekankan pada kemakmuran material sebagai hal yang penting bagi manusia yang dapat dicapai melalui penciptaan kekayaan dengan penekanan pada pasar bebas yang kompetitif serta pengakuan terhadap kepemilikan pribadi yang kuat (Lang, 2013). Hal ini dikarenakan anggapan dari pemikiran ini yang menganggap bahwa mekanisme pasar merupakan faktor yang dapat mendorong kebebasan individu, terlebih jika disertai dengan adanya identifikasi terhadap musuh bersama (Cahill & Konings, 2017).

Harvey (2005) juga menambahkan bahwa sebagai kerangka teoritis, neoliberalisme berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pemberian kebebasan yang lebih besar kepada individu, termasuk dalam hal keterampilan kewirausahaan dalam kerangka kelembagaan yang ditandai dengan adanya pengakuan yang kuat terhadap hak kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Dalam perspektif studi hubungan internasional, neoliberalisme bertumpu pada keyakinan pada kemampuan negara dan masyarakat untuk mengatasi keadaan alami konflik (*natural state of war*) melalui interdependensi, kerja sama, dan norma-norma yang memenuhi kepentingan semua orang (Kapitonenko, 2022). Berbeda dengan pandangan kaum realis, neoliberalisme meyakini bahwa dalam sistem internasional yang tidak memiliki otoritas pusat, negara-negara akan secara kooperatif melakukan kerja sama demi kepentingannya. Sehingga keamanan dapat tercapai melalui munculnya perjanjian, peningkatan perdagangan, dan usaha kerja sama lainnya yang akan menguntungkan semua negara yang terlibat (Kaufman, 2022).

Salah satu bentuk implikasi dari perkembangan aliran neoliberal dalam konteks global ialah lahirnya Konsensus Washington. Konsensus Washington sendiri merupakan upaya untuk menghidupkan kembali gagasan historis liberalisme klasik dalam skala global. Konsensus ini mencakup serangkaian ide yang disebarkan oleh berbagai institusi pembangunan internasional dengan fokus khusus pada pergeseran paradigma yang terjadi pada tahun 1980-an (Gore, 2000). Konsensus ini merupakan seperangkat resep kebijakan neoliberal yang dipromosikan oleh berbagai institusi yang berbasis di Washington D.C., terutama

oleh *International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat (Moosa & Moosa, 2019). Resep kebijakan ini dimuat dalam sepuluh item sebagaimana yang diuraikan oleh Williamson (2005) sebagai berikut:

1. Implementasi disiplin fiskal yang diprioritaskan untuk menghindari penggunaan pajak inflasi.
2. Menetapkan prioritas terhadap pengeluaran publik.
3. Reformasi pajak yang disorot sebagai sarana untuk memperluas basis pajak dan mengurangi tarif pajak marginal.
4. Liberalisasi keuangan dimana tingkat suku bunga ditentukan oleh pasar.
5. Penganjuran untuk menetapkan nilai tukar yang kompetitif.
6. Liberalisasi perdagangan melalui penghapusan pembatasan kuantitatif dan pengaturan tarif perdagangan.
7. Penghapusan terhadap berbagai hambatan masuknya investasi asing langsung.
8. Privatisasi badan usaha milik negara.
9. Deregulasi atau penghapusan peraturan yang menghambat masuknya peraturan baru atau membatasi persaingan.
10. Sistem hukum yang memberikan jaminan atas hak kepemilikan tanpa biaya yang berlebihan dan memperluas hak-hak ini ke sektor informal.

2.1.2. Investasi Asing Langsung (FDI)

Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) mengacu pada pengeluaran lintas batas (*cross-border expenditures*) yang dilakukan untuk memperoleh dan memperluas kendali perusahaan atas aset-aset produktif (Froot,

1993). Investasi asing langsung (FDI) juga dapat dikatakan sebagai investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari satu negara ke negara lainnya. FDI dianggap sebagai elemen penting dalam proses globalisasi ekonomi dimana perusahaan multinasional (*multinational company*/MNC) memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Plouffe, 2020). FDI juga merupakan katalis utama dalam berbagai aspek perekonomian di suatu negara seperti penciptaan lapangan pekerjaan, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (Kuzey dkk., 2021).

FDI merupakan jenis investasi yang stabil dalam jangka waktu yang lama (Shapiro dkk., 2022). Selain itu, Moosa (2003) juga menambahkan bahwa FDI adalah investasi jangka panjang yang melibatkan akuisisi kepemilikan jangka panjang di suatu perusahaan asing. FDI juga dapat disebut sebagai investasi modal yang ditujukan untuk partisipasi jangka panjang dalam bentuk kontrol atas dasar kesetaraan atau minoritas di perusahaan asing untuk menciptakan cabang asing atau dikenal dengan istilah “investasi *Greenfield*” (Santis, 2012).

Sârbu dan Gavrea (2014) dan Zitta dan Powers (2003) mengategorikan investasi asing langsung ke dalam dua jenis berdasarkan motivasinya. Sârbu dan Gavrea (2014) mengidentifikasi keuntungan kepemilikan dan internasionalisasi sebagai motivator utama, sementara Zitta dan Powers (2003) mengidentifikasi faktor motivasi internal dan eksternal perusahaan. Faktor motivasi internal perusahaan meliputi kebutuhan untuk pertumbuhan, keuntungan, teknologi, serta keinginan yang berorientasi global. Sedangkan faktor motivasi eksternal meliputi faktor sumber daya manusia, ukuran pasar, iklim politik, serta pasar modal.

Selanjutnya Sârbu dan Gavrea (2014) mengidentifikasi tiga komponen yang termasuk ke dalam analisis struktural terhadap FDI, diantaranya:

- a. Partisipasi langsung dalam modal, baik dalam bentuk modal ekuitas ataupun pembelian saham pada suatu perusahaan di luar negeri.
- b. Pendapatan yang diinvestasikan kembali, yakni pendapatan investor yang secara langsung diinvestasikan kembali pada anak perusahaan atau perusahaan induk.
- c. Pinjaman intra perusahaan, yakni pinjaman jangka pendek atau panjang antara investor langsung dengan anak perusahaan atau perusahaan induk.

2.2. Penelitian Terdahulu

Setelah mengajukan perincian terhadap keseluruhan konseptualisasi yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menunjukkan kebaruan penelitian ini adalah perlu untuk mendudukan skema teoretis yang digunakan penelitian ini dalam pembahasan terkait pengaruh kebijakan *Abenomics* terhadap *inward* FDI di Jepang.

Salah satu penelitian yang membahas terkait implementasi kebijakan *Abenomics* adalah penelitian yang dilakukan oleh Abas (2018) yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan *Abenomics* di Jepang Tahun 2012-2017”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini berfokus dalam menganalisis bagaimana implementasi kebijakan *Abenomics* yang

diterapkan di bawah kepemimpinan Shinzo Abe pada tahun 2012. Tujuan dari implementasi kebijakan tersebut adalah untuk mencari jalan agar dapat memulihkan kembali perekonomian Jepang yang mengalami resesi. Melalui kebijakan tersebut, Shinzo Abe memperkenalkan tiga program kebijakan utama, yakni kebijakan stimulus moneter, stimulus fiskal, dan reformasi struktural. Namun dalam penerapannya, kebijakan tersebut masih belum menampakkan hasil yang diharapkan oleh Pemerintah Jepang. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak tercapainya target inflasi 2% serta peningkatan pajak konsumsi 10% serta ekonomi Jepang yang masih fluktuatif (Abas, 2018).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hoshi (2018) yang berjudul “*Has Abenomics Succeeded in Raising Japan’s Inward Foreign Direct Investment?*”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan regresi linear sederhana dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji seberapa sukses kebijakan *Abenomics* dan membahas terkait penyesuaian apa yang diperlukan untuk meningkatkan FDI untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi Jepang. Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya dampak yang jelas dari kebijakan *Abenomics* dapat dipengaruhi oleh kurangnya waktu untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Penelitian ini membuka kemungkinan bahwa kebijakan *Abenomics* memiliki potensi untuk mendorong masuknya investasi asing langsung (FDI) di Jepang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jepang. Namun, Pemerintah Jepang harus lebih fokus untuk melakukan reformasi peraturan dan administrasi untuk menghilangkan hambatan terhadap ekspansi bisnis perusahaan asing di Jepang (Hoshi, 2018).